

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PANITIA PENGUJI..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS iv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... v

ABSTRAK vii

ABSTRACT..... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang 1

1.2. Rumusan masalah 17

1.3. Tujuan penelitian 17

1.4. Manfaat penelitian 18

1.5. Tinjauan pustaka..... 18

1.5.1. Penegakan hukum 18

1.5.2. Teori kewenangan 22

1.5.3. Tindak pidana khusus di laut..... 24

1.6. Metode penelitian 26

1.6.1. Tipe penelitian..... 26

1.6.2.	Pendekatan masalah	27
1.6.3.	Sumber bahan hukum.....	28
1.6.4.	Pengumpulan dan analisis bahan hukum	30
1.7.	Sistematika penulisan	30
BAB II. EKSISTENSI BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT		
2.1.	Sejarah terbentuknya BAKAMLA	32
2.2.	Organisasi, sarana operasi kemananan laut dan personel BAKAMLA	38
2.2.1.	Organisasi BAKAMLA	38
2.2.2.	Sarana operasi keamanan laut BAKAMLA	43
2.2.3.	Personel BAKAMLA	44
2.3.	Fungsi BAKAMLA dalam melaksanakan tugasnya	45
2.4.	BAKAMLA sebagai <i>coast guard</i> dan kerjasama berskala Internasional	48
2.4.1.	BAKAMLA sebagai <i>coast guard</i>	48
2.4.2.	Kerjasama BAKAMLA berskala internasional	55
BAB III. KEWENANGAN BAKAMLA DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN AWAL PELANGGARAN HUKUM DI LAUT		
3.1.	Kewenangan BAKAMLA dan penanganan perkara hasil operasi keamanan laut	64
3.1.1.	Kewenangan BAKAMLA.....	64

3.1.2.	Penanganan perkara hasil operasi keamanan laut	69
3.2.	BAKAMLA sebagai aparat penegak hukum di laut.....	73
3.2.1.	Konsep penegakan hukum di laut	73
3.2.2.	Penyelidikan dan penyidikan awal.....	77
3.3.	Instansi penyidik yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut	80
3.4.	Koordinasi BAKAMLA dengan instansi penegak hukum lainnya	90
3.4.1.	BAKAMLA sebagai <i>single agency multy task</i>	90
3.4.2.	BAKAMLA sebagai <i>leading sector</i> dalam penegakan hukum di laut.....	97
BAB IV. PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	102
4.2.	Saran.....	104

DAFTAR BACAAN